

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA DALAM PROGRAM P4GN (PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA) DI KOTA SAMARINDA

YANTI AGUSTINA FRAZMA¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Di Kota Samarinda dan penghambat dalam Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Di Kota Samarinda.

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. Fokus penelitian dalam memaksimalkan Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Di Kota Samarinda mengacu pada Program P4GN, yaitu meliputi : a. Bidang Pencegahan, b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, c. Bidang Rehabilitasi, d. Bidang Pemberantasan. Narasumber meliputi wakil dari bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, dan bidang pemberantasan selaku *Key Informan*, dan masyarakat kota Samarinda selaku *Informan*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dan penelitian lapangan (*Field Work Research*) dengan teknik : observasi, wawancara, dokumentasi. Analisa data yang digunakan yaitu alat analisis data model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Kota Samarinda belum maksimal dalam menjalankan program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan di Kota Samarinda. Faktor penghambat meliputi kurangnya peralatan dan anggota dalam menjalankan program P4GN.

Kata Kunci : P4GN

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

PENDAHULUAN

Peneliti mengambil penelitian pada Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda di mana setiap tahunnya pengguna narkoba di Samarinda mengalami peningkatan, meskipun sempat terjadi penurunan di 2014 yaitu 348 pengguna narkoba, jumlah pengguna naik di tahun 2015 yaitu sebanyak 490 orang. Untuk mengatasi peredaran narkoba di Samarinda itu sendiri, peran BNN kota Samarinda diharapkan dilaksanakan dengan maksimal dan ditingkatkan, agar dapat memberantas penyebaran atau setidaknya memperlambat penyebaran narkoba di kota Samarinda.

Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sebenarnya telah melakukan langkah-langkah dalam mengatasi beredar luasnya Narkoba di kota Samarinda dengan cara menjalankan salah satu program P4GN, hal tersebut dapat dilihat melalui sosialisasi yang dilakukan rutin oleh pihak BNNK dalam program P4GN, sosialisasi ini dilakukan dengan cara mengunjungi satu persatu wilayah seperti sekolah, mall, dan lain-lain. Program ini berisi materi-materi mengenai bahaya narkoba maupun dampaknya, untuk saat ini BNNK juga mengadakan senam sehat yang bertujuan mengajak masyarakat untuk menjauhi Narkoba.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara adapun masalah yang penulis dapat dari hasil observasi dilapangan yaitu peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda belum maksimal dalam menjalankan program tersebut, lokasi yang digunakan dalam sosialisasi masih kurang mendukung, Masyarakat yang mengikuti sosialisasi ini tidak seluruhnya mengikuti sampai akhir, terkadang ada saja yang pulang sehingga sosialisasi tidak diikuti hingga selesai, kurangnya informasi dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) terlihat dari banyaknya masyarakat yang hanya datang mengikuti kegiatan senam tanpa tahu apa tujuan dari kegiatan tersebut, Badan Narkotika Nasional telah melakukan sosialisasi berupa penyebaran brosur mengenai bahanya Narkoba, melakukan kampanye disekitar kota Samarinda, dan juga melakukan penyuluhan tetapi hasilnya masih belum maksimal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Samarinda dalam program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) di kota Samarinda ?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat terhadap peran Badan Narkotika Nasional Samarinda dalam program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) di kota Samarinda ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Narkotika Nasional Samarinda dalam program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) di kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam peran Badan Narkotika Nasional Samarinda dalam program P4GN

(Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) di kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Negara secara khusus.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah yang berkaitan dengan ilmu administrasi negara.
2. Secara praktis
 - a. Untuk memperdalam, menambah, dan mengembangkan pengetahuan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulis karya ilmiah.
 - b. Sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan yang ingin menggunakan hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan serta bahan penelitian bagi peneliti lebih lanjut.
 - c. Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan tingkat akhir untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

KERANGKA DASAR TEORI

Peran

Menurut Veithazal Rivai (2006 :248) berpendapat mengenai peran, peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, sedangkan menurut Adam (2000 :935) peran adalah perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu. Dan menurut Soekanto (2002 :243) adalah proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Macam-macam Peran

Soekanto (2002 :242) memberikan pendapat mengenai pembagian peran terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Peran aktif
Peran aktif ialah peran yang diberikan oleh kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifis kelompok, seperti pengurus, pejabat dan sebagainya.
2. Peran partisipatif
Peran partisipatif ialah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

Organisasi

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2008 :24) Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang berkerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, berbeda menurut D.Mooney dalam Fathoni (2006 :22) mengatakan bahwa organisasi timbul bila mana orang-orang bergabung dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat lain dikemukakan oleh Pradjudi dalam Malayu (2014 :26) organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang berkerja secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Macam-Macam Teori Organisasi

1. Teori Organisasi Klasik

Teori ini bisa disebut dengan "teori tradisional" atau disebut juga "teori mesin". Berkembang mulai 1800-an (abad 19). Dalam teori ini organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku tidak mengandung kreatifitas. Dikatakan teori mesin karena organisasi ini menganggap manusia bagaikan sebuah onderdil yang siap digonta-ganti sesuai kehendak pemimpin. Definisi organisasi menurut teori klasik yaitu organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Teori organisasi klasik sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. Ada 4 (empat) unsur-unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal :

- a. Sistem kegiatan yang terkoordinasi
- b. Kelompok orang
- c. Kerjasama
- d. Kekuasaan dan kepemimpinan

Sedangkan menurut teori klasik suatu organisasi tergantung pada 4 (empat)

kondisi pokok :

- a. Kekuasaan
- b. Saling melayani
- c. Dokrin
- d. Disiplin

Sedangkan yang menjadi tiang dasar penting dalam organisasi formal adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian kerja (untuk koordinasi)
- b. Proses scalar dan fungsional (proses pertumbuhan vertical dan horizontal)

- c. Struktur (hubungan antar kegiatan)
- d. Rentang kendali (berapa banyak atasan bias mengendalikan bawahan) variabel-variabel lingkungan dalam analisisnya, karena perbedaan kondisi lingkungan akan memerlukan aplikasi konsep atau teknik manajemen yang berbeda pula. Pendekatan ini muncul karena ketidakpuasan atas anggapan keuniversalan dan kebutuhan untuk memasukkan berbagai variable lingkungan kedalam teori dan praktek manajemen. Ada tiga komponen pokok dalam kerangka konseptual untuk pendekatan situasional ini yaitu lingkungan, konsep-konsep, dan tehnik-tehnik manajemen, dan hubungan kontegensi antara kedua.

a. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem dalam manajemen merupakan pendekatan yang ditetapkan paling akhir, dan dapat dipahami dengan sudut pandangan teori sistem umum atau analisis sistem. Pendekatan sistem terutama menekankan saling ketergantungan dan keterkaitan bagian-bagian organisasi sebagai keseluruhan. Pendekatan ini memberikan kepada manajemen cara memandang organisasi sebagai keseluruhan dan sebagai bagian lingkungan eksternal yang lebih luas. Organisasi dipandang sebagai sistem terbuka dan pada hakekatnya merupakan proses transformasi berbagai masukan yang menghasilkan keluaran.

Tujuan Organisasi

Menurut Ati Cahyani (2003:37-38) ada dua macam tujuan organisasi, yaitu :

1. Tujuan Organisasi Tunggal

Organisasi tujuannya tunggal adalah ciri organisasi masa lalu, tujuan organisasi

bersifat tunggal adalah perusahaan perdagangan atau niaga. Dalam kegiatan organisasi tersebut bertujuan mendapatkan profit sebanyak mungkin, namun hal ini tidak ada artinya jika keadaan masyarakat sekitar mereka hidupnya tidak sejahtera. Karena jika masyarakat tidak sejahtera maka mereka tidak dapat mengkonsumsi atau memanfaatkan produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Nantinya hal itu juga berakibat tidak baik terhadap perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan berkurangnya penggunaan produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Demikian juga dengan organisasi yang bergerak dibidang sosial, seperti rumah sakit, mereka dengan tujuan tunggalnya yaitu memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap para pasien tidak akan dapat berbuat banyak jika mereka tidak memberikan keringanan terhadap pasien yang tidak mampu membayar walaupun sangat membutuhkan jasa medis, sehingga hal ini akan membuat rumah sakit tersebut akan mendapat cap "komersil" di masyarakat dan sebagai akibatnya akan ditinggalkan oleh pasiennya.

2. Tujuan Organisasi Ganda

Sekarang ini organisasi memiliki tujuan ganda, yaitu tujuan ke dalam organisasi dan keluar organisasi. Tujuan ke dalam organisasi dapat dirumuskan secara umum, yaitu meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, serta meningkatkan produktivitas dan hasil. Sedangkan tujuan ke luar organisasi adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Unsur-Unsur Organisasi

1. Manusia (*Man*)
2. Kerjasama (*Team Work*)
3. Tujuan bersama
4. Peralatan (*Equipment*)
5. Lingkungan (*Environment*)
6. Kekayaan Alam

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adaktif lainnya kecuali bahan adaktif untuk tembakau dan alkohol

Sejarah Terbentuknya BNN

Pada masa itu permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karna bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkatkan dan makin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, oleh karena itu, pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Non Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan di Kabupaten/kota. Di provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di

Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitas, Deputi pemberantasan, dan deputi hukum dan kerjasama. Adanya perwakilan BNN disetiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya program P4GN, dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

Tujuan Dan Pokok dan Fungsi BNN

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
3. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
5. Memeberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika narkoba.
7. Melalui kerjasama bilateral dan lultiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

Selain tugas sebagaimana di atas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adaktif lainnya kecuali bahan adaktif untuk tembakau dan alkohol. Dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional adalah :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adaktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

2. Penyusunan ,perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi hukum dan kerjasama dibidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, peberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaa kebijakan nasional dibidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasin di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
11. Pelaksana pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psicotropika dan prekursor serta bahan adaktif lainnya, kecuai bahan adaktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali kedalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/pecandu narkoba dan psicotropika serta bahan adaktif lainnya kecuali bahan adaktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psicotropika serta bahan adaktif lainnya, kecuai bahan adaktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psicotropika serta bahan adaktif lainnya, kecuali bahan adaktif tembakau dan alkohol berbasis komunikasi terapeutik atau metode lain yang telah terujikeberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasioanl, regional dan internasional di bidang P4GN.

17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN.

Program P4GN

Untuk lebih memfokuskan pencapaian ‘‘Indonesai Bebas Narkoba’’ diperlukan Peran dan strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan pemberantasan narkoba yang meliputi bidang :

1. Pencegahan
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Rehabilitasi
4. Pemberantasan Narkoba

Jenis-jenis Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Keberadaan narkoba sangat ditentang pemerintah maupun masyarakat karna dampak yang ditimbulkan sangat merugikan, agar mudah diketahui narkoba sudah dibagi menjadi beberapa jenis dan dibagi menjadi beberapa

golongan, berikut jenis-jenis narkoba :

1. Narkotika
2. Psikotropika
3. Zat adaktif lainnya

Efek yang ditimbulkan narkoba

Ada berbagai dampak yang ditimbulkan oleh narkoba, baik itu secara fisik, emosi maupun perilaku pemakainya. Berikut dampak/efek dari narkoba :

1. Depresan (*Downer*)
2. Stimulan (*Upper*)
3. Halusinogen

Definisi Konsepsional

Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan definisi konsepsional yang menyangkut judul skripsi agar mempermudah dan memahami maksud pembahasan ini. Adapun definisi konsepsional dari Peran Badan Narkotika Nasional Samarinda Dalam Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) adalah peranan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengoperasikan program-program kegiatan yang dijalankan oleh pihak BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna memberantas penyalahgunaan narkoba di kota Samarinda

METODE PENELITIAN

Menurut Arikunto (2005:234) bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan

Fokus Penelitian

yang menjadi fokus penelitiannya adalah :

1. Peran Badan Narkotika Nasional Samarinda dalam program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) meliputi :
 - a. Pencegahan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Rehabilitasi
 - d. Pemberantasan
2. Faktor penghambat peran Badan Narkotika Nasional Samarinda dalam program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba).

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder diantaranya seperti :

Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Pada data primer ini, untuk menentukan *Key Informan* dan *Informan*, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan teknik *Aksidental Sampling*. Maka dalam penelitian ini *Key Informan* adalah ketua bidang pencegahan sejumlah satu orang, ketua bidang pemberdayaan masyarakat sejumlah satu orang, ketua bidang rehabilitasi sejumlah satu orang, ketua bidang pemberantasan sejumlah satu orang dan *Informannya* adalah masyarakat di sekitar BNN Kota Samarinda berjumlah tujuh orang, tiga orang pengguna narkoba yang sedang direhabilitasi di BNNK Samarinda dan empat orang masyarakat yang pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh BNNK Samarinda.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi diantaranya seperti buku-buku ilmiah dari perpustakaan dan data-data yang diperoleh dari Kantor Desa Karang Tunggul berupa data monografi desa dan struktur organisasi desa.

Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini digunakan beberapa cara yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) artinya mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian.
2. Penelitian Lapangan yaitu dengan meneliti langsung kelokasi yang menjadi objek penelitian, yang meliputi :
 - a. Observasi, yaitu peneliti menggunakan teknik observasi aktif dimana peneliti terlibat langsung dalam lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap Peran Badan Narkotika Nasional Samarinda Dalam Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) di kota Samarinda.
 - b. Wawancara, dengan menanyakan langsung atau mewawancarai orang (informan) sebagai narasumber yang mengetahui dan menguasai permasalahan dan memiliki informasi serta bersedia memberikan informasi.
 - c. Dokumentasi, mengumpulkan data atau informasi dengan menggunakan gambar yang relevan. Dokumentasi dilakukan dengan pengambilan foto-foto sebagai bukti penelitian

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data model interaktif dari Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman dan Saldana (2004:33) yaitu analisis terdiri empat (4) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. *Data Collection* (pengumpulan data)
2. *Data Condensation* (data kondensasi)
3. *Data Display* (penyajian data)
4. *Conclusion Drawing/verifying* (menarik kesimpulan/verifikasi)

Hasil penelitian

Berdasarkan teori Soekanto (2002:243) bahwa peran adalah proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Adapun pembahasan dari hasil penelitian mengenai peran Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan program P4GN antara lain :

1. Bidang Pencegahan

Bidang pencegahan ialah salah satu unit struktur organisasi yang terdapat di dalam BNN Kota Samarinda, bidang pencegahan ini yang

mempunyai tugas penyiapan, pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kota Samarinda. Seksi pencegahan sangat penting bagi masalah peredaran narkoba, karena dengan adanya pencegahan dapat menahan seseorang yang ingin mencoba narkoba, dan memperkecil skala penggunaan narkoba di masyarakat yang berdampak pada sifat pengguna yang dapat meresahkan masyarakat dan sangat merugikan diri sendiri. Hal ini juga dijelaskan oleh Notosoedirdjo dan Latipun (2005:145) pencegahan merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian, kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya.

Bidang Rehabilitasi

Bidang Pemberantasan

Bidang pemberantasan ialah salah satu unit struktur organisasi yang terdapat di dalam BNN Kota Samarinda, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adaktif lainnya kecuali bahan adaktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah kota Samarinda. Pemberantasan ialah proses pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 19 d bahwa dalam memberantas dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan precursor serta bahan adaktif lainnya, kecuali bahan adaktif untuk tembakau dan alkohol.

Faktor-Faktor Penghambat Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Program P4GN di Kota Samarinda

.Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan faktor penghambat Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda mengenai kurangnya peralatan dan anggota dalam menjalankan program-program tersebut, tiga dari empat bidang mengalami masalah yang sama, hal ini dapat menghambat para pekerja dalam menjalankan kewajibannya dalam memberantas penyebar luasan narkoba di Kota Samarinda. Kemudian faktor lainnya yaitu keterbatasan komunikasi antara pengguna dengan konselor, dan faktor lainnya yaitu kurangnya peralatan dari bidang pemberantasan dalam melakukan penangkapan maupun pengejaran terhadap pengedar maupun bandar besar yang ada di Kota Samarinda.

Dan dari hasil wawancara dengan masyarakat peneliti dapat menyimpulkan faktor penghambat Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda menurut masyarakat ialah kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan program, dana/anggaran dari program P4GN, fasilitas yang kurang mendukung, penentuan lokasi, dan pendekatan kepada masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada fokus penelitian yang peneliti tentukan mengenai Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Program P4GN Di Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran BNNK Samarinda dalam program P4GN di bidang pencegahan masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya sarana dalam melakuakn penyebaran informasi berupa spanduk dan toak, dan kurangnya anggota-anggota dalam menjalankan program yang telah ditentukan sehingga menghambat program yang ingin dijalankan baik program dari pihak BNNK ataupun program dari masyarakatnya itu sendiri.
2. Peran BNNK Samarinda dalam program P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat masih belum maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya peralatan dalam melakukan pelatihan seperti peralatan untuk memasak, menganyam dan menjahit. Dan juga kurangnya anggota dalam melakukan program-program yang diadakan pihak BNNK dan kurangnya anggota dalam melakukan pengawasan tes urine.

Saran

Di dalam memaksimalkan peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam program P4GN di Kota Samarinda setelah dilaksanakan penilaian maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dari pihak pencegahan untuk memaksimalkan perannya dalam memperbanyak anggota dalam penyuluhan maupun sosialisasi atau dengan memanfaatkan masyarakat-masyarakat yang telah menjadi relawan anti narkoba atau duta anti narkoba, terlebih apabila permintaan penyuluhan bertambah setiap harinya, jadi diharapkan permintaan masyarakat untuk sosialisasi ataupun sosialisasi dari pihak BNNK itu sendiri berjalan dengan lancar dan tidak kekurangan anggota dalam melakukan penyuluhan maupun sosialisasi di kota Samarinda.
2. Seharusnya dalam melakukan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat tidak hanya di daerah rawan narkoba saja, karna perkembangan narkoba semakin hari semakin merajarela, dan tidak dapat di prediksi dimana saja peredaran tersebut dilakukan, jadi sebaiknya memberdayakan masyarakat dilakukan keseluruhan masyarakat Samarinda, dan dalam melakukan pengawasan tes urine agar memperbanyak anggota karna harus di awasi dengan ketat dengan orang-orang yang paham dibidangnya, seperti berkerja sama dengan pijak rumah sakit, puskesmas, atau sebagainya.
3. Karena keterbatasan Bahasa dalam melakukan proses konseling, sebaiknya pihak konselor juga melakukan pendekatan kepada pihak keluarga pengguna narkoba, agar proses konseling lebih efektif..
4. Seharusnya apabila pihak dari bidang pemberantasan kekurangan anggota dalam melakukan penyelidikan seharusnya meminta bantuan kepada pihak yang lebih mengerti dibidangnya, seperti polisi setempat, mengingat dalam

melakukan penyelidikan tersebut yang disasar ialah pengedar ataupun bandar besar sehingga membahayakan anggota yang tidak dibidangnya, sehingga diharapkan agar meminta bantuan dengan pihak yang lebih berkompeten dibidangnya agar penyelidikan lebih maksimal.

Daftar Pustaka

- Adam, 2000. *Sosiologi Keluarga*. Gramedia .sol
- Arikunto, S., 2005, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Arnot, D., 2009. *Pustaka Kesehatan Populer: Pengobatan Praktis Perawatan Alternatif dan Traditional*. PT Bhuana Ilmu Populer, p. 180. Jakarta
- Ati Cahyani, 2003. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, PT. Grasindo. Jakarta.
- Davis, Keith & John W.Newstrom. 2008. Jilid 1-2 *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta PT Erlangga.
- Dessler, Gary, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Terjemahan, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Ernie Tisnawati, Kurniawan Saefullah, 2005 *Pengantar Manajemen*, Murai Kencana, Jakarta.
- Fathoni, Abdulrahman, 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber daya Manusia*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Fariad Ali, Baharuddin, 2014, *Ilmu Administrasi Dalam Pendekatan Hakikat Inti*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hasibuan, Malayu, 2014. *Organisasi dan Motifasi*. PT Bumi Askara. Jakarta.
- J. Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategic Untuk Organisasi Public Dan Organisasi Non Profit*. PT. sGasindo. Jakarta.
- Maleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), Remaja Rosada Karya. Bandung.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Malayu S.P, Hasibuan, 2008, *Organisasi dan Motivasi*, Sinar Grafika Offset: Jakarta.
- Notosoedirjo, 2005. *Kesehatan Mental*. Malang : UMM Press
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Askara.
- Umar, Husein. 2004. *Metode Risert Ilmu Administrasi*. PT. Gramedia Pustaka Utara. Jakarta.
- Usman, Husaini dan Purnomo Akbar. 2003. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Veithazal Rivai. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi* PT. Raja grafindo persada. Jakarta. 2006.
- Dokumen-dokumen :**
- KBBI. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 19 d

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13

UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Skripsi :

Mubarak, Zaki. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.

Sumber Internet :

<http://www.unodc.org/indonesia/news.html> diakses pada tanggal 14 April 2017

www.bnn.go.id>hasil_lit_bnn_2015 diakses pada tanggal 27 April 2017

www.dprd-kaltimprov.go.id diakses pada tanggal 14 Mei 2017

www.wikipedia.com.org-badan-narkotika-nasional diakses pada 16 Mei 2017

www.bnn.go.id>read>page>sejarah>terbentuknya>bnn diakses pada 16 Mei 2017

www.seputarpendidikan.com/2017/-0/10-pengertian-narkoba-menurut-para-ahli.html diakses pada 22 Mei 2017

<http://wesaynotodrugs.wordpress.com/abaout/dampak-dampak-yang-ditimbulkan-oleh-narkoba/> diakses pada 22 Mei 2017

[:https://nirmalandundotcom.wordpress.com/2012/07/22/konsep-dasar-dan-teori-organisasi/](https://nirmalandundotcom.wordpress.com/2012/07/22/konsep-dasar-dan-teori-organisasi/) diakses pada 26 Mei 2017

<https://maliqren.wordpress.com/2011/11/27/ciri-ciri-organisasi/> diakses pada 26 Mei 2017